

# Arah Perkembangan Asia Tenggara

Asnani USMAN\*

Tahun-tahun sejak ASEAN berdiri dilalui dengan berbagai kegiatan berupa pertemuan-pertemuan untuk membahas berbagai bidang baik ekonomi, politik maupun budaya. Tetapi perkembangan berbagai kerjasama bidang-bidang tersebut tidak menunjukkan titik cerah. Kemacetan penyelesaian politik masalah Kamboja masih tetap menghadang. Kerjasama ekonomi masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai. Gagasan-gagasan baru dicetuskan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ASEAN dalam usahanya untuk tetap hidup.

Di lain pihak terjadi perkembangan-perkembangan dalam negeri yang menonjol di negara-negara Asia Tenggara yang sepiantas tampak mengesankan akan terjadi perubahan-perubahan yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi baik kawasan maupun negara-negara di Asia Tenggara. Masalah pembaharuan ekonomi di negara-negara Indocina di satu pihak dan masalah stabilisasi politik di negara-negara ASEAN merupakan perkembangan yang menonjol di kawasan Asia Tenggara.

## KERJASAMA ASEAN

Dalam Konperensi Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) ke-19 tanggal 23-24 Juni 1986 di Manila, keinginan Papua Nugini (PNG) untuk menjadi anggota ASEAN yang dikemukakan oleh Menlu Legu Vagi belum mendapatkan perhatian dan reaksi yang serius dari negara-negara ASEAN. Dalam kunjungannya ke Jakarta awal tahun, Menlu Vagi hanya mengemukakan keinginan PNG untuk menandatangani Perjanjian Persahabat-

an dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity Cooperation in South-east Asia*). Sejak tahun 1981, status PNG di ASEAN adalah peninjau khusus, dan sebelumnya hanya peninjau saja.

Untuk menerima usul ini ASEAN harus mencapai konsensus. Beberapa persoalan akan menjadi pertimbangan ASEAN, misalnya apakah PNG termasuk kawasan Asia Tenggara atau tidak. Sejauh ini tidak diketahui dengan jelas negara-negara mana saja termasuk Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Pada masa Perang Dunia II, misalnya, Komando Pasukan Sekutu di Asia Tenggara yang berkedudukan di Kolombo mempunyai wewenang dan tanggung-jawab atas Sri Lanka, Birma, Muangthai, Malaysia dan Australia. Tetapi sejak Agustus 1945 ruang lingkup ini diperluas dengan semua bekas daerah pendudukan Jepang, kecuali Filipina dan Vietnam. PNG berada dalam satu pulau dengan wilayah Indonesia, Irian Jaya, sebagai bagian kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian masalah geografi tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pertimbangan ASEAN di atas.<sup>2</sup>

Dari segi politik kehadiran PNG dalam ASEAN akan meredakan kekhawatiran negara ini yang merasa terancam oleh negara tetangganya, Indonesia. Timbulnya masalah etnis dan sengketa perbatasan dianggap sebagai petunjuk awal ancaman tersebut. Dimilikinya rasa aman akan menghilangkan hambatan psikologis untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara PNG dan Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya. PNG juga akan dapat banyak belajar cara-cara ASEAN mengatasi berbagai persoalan, misalnya masalah gerakan separatis dan konflik perbatasan.<sup>3</sup>

Dari segi ekonomi, walaupun sampai saat ini kerjasama ekonomi ASEAN belum menunjukkan kemajuan, PNG akan dapat mengharapkan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan ekonominya, misalnya diversifikasi pasar dan partisipasi dalam proyek-proyek ASEAN. PNG juga akan dapat ikut-serta dalam kerjasama ekonomi dengan rekan-rekan dialog ASEAN.

Selain itu, dalam AMM ke-19 dikemukakan juga gagasan yang menyangkut bidang politik dan keamanan, yaitu tentang pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir (ZBSN) yang merupakan komponen penting dari ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*). Menlu Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa gagasan ini akan memberikan dukungan positif bagi

<sup>1</sup>Kompas, 27 Juni 1986.

<sup>2</sup>J. Kusnanto Anggoro, "Masalah Keanggotaan Papua Nugini dalam ASEAN," *Suara Karya*,

usaha perlucutan senjata internasional di satu pihak, dan akan menjamin kepentingan keamanan baik nasional maupun regional di Asia Tenggara di lain pihak.<sup>4</sup> ASEAN memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk merealisasikan gagasan ini mengingat berbagai kendala yang harus diperhitungkan, seperti masalah Kamboja dan adanya basis-basis militer asing dalam kawasan. Di lain pihak di antara negara-negara ASEAN, suatu konsensus harus dicapai mengenai sasaran dan tujuan gagasan tersebut yang berarti kesepakatan untuk mengakui, menerima dan mengatur berbagai macam kepentingan nasional, persepsi dan harapan yang berbeda. Faktor lain yang diperlukan adalah kesiediaan negara-negara nuklir untuk mengakui dan menghormati ZOPFAN ataupun ZBSN. Hal ini sangat tergantung dari kepentingan-kepentingan strategis, persepsi, kebijakan, dan saling hubungan antar-negara adikuasa itu sendiri.<sup>5</sup>

Sementara itu Malaysia masih tetap menekankan gagasan untuk mengadakan konperensi internasional tentang lalu-lintas obat bius dan narkotik. Ini belum terealisasikan. Tetapi dalam AMM ke-18 tahun 1985 telah dikeluarkan Pernyataan Bersama untuk mendukung usaha-usaha masyarakat internasional dalam mempersiapkan rancangan konvensi baru menentang lalu-lintas narkotik gelap.<sup>6</sup> Gagasan tentang Kerjasama ASEAN-Pasifik mengenai pengembangan sumberdaya manusia yang sempat menegangkan hubungan Indonesia dan Malaysia pada waktu ini tidak menjadi masalah lagi, dan proyek itu mulai dilaksanakan.<sup>7</sup>

Masalah penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan di atas adalah KTT ASEAN III. Ini diusulkan Muangthai yang sebelumnya telah dibicarakan dalam pertemuan PM Lee Kuan Yew dan PM Prem Tinsulanonda di Bangkok. Usul ini mendapat tanggapan positif dari negara-negara ASEAN lainnya dan direncanakan akan diadakan bulan Desember 1987 di Manila. Tampaknya tidak adanya kemajuan dalam kerjasama ekonomi ASEAN merupakan pendorong utama diterimanya usul tersebut.

Dalam bidang ekonomi, kerjasama ASEAN masih suram. Hal ini tercermin dari penilaian Presiden Corazon Aquino dalam Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN ke-18 tanggal 28-30 Agustus 1986 di Manila yang mengungkapkan bahwa negara-negara ASEAN selama ini berjalan sendiri-sendiri dan lebih menekankan hubungan ekonomi dengan negara-negara non-ASEAN.<sup>8</sup> Penilaian ini didasarkan pada hasil yang dicapai Kerjasama

<sup>4</sup>Kompas, 24 Juni 1986.

<sup>5</sup>J. Soedjati Djiwandono, "Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir: Catatan atas Beberapa Masalah," *Analisa*, No. 6 (Juni 1986): hal. 477.

<sup>6</sup>The Jakarta Post, 24 November 1986.

<sup>7</sup>Kompas, 22 Juni 1986.

Ekonomi Intra ASEAN KTT Bali 1976 telah menetapkan tiga bidang kerjasama ini, yaitu perdagangan, investasi dan teknik. Kerjasama Perdagangan dinilai tidak mengalami kemajuan. Perdagangan di antara negara-negara ASEAN hanya mencakup sekitar 17% dari total perdagangan ASEAN (tanpa Brunei). Kebijakan PTA (*Preferential Trading Arrangement*) yang memberi potongan antara 5-10% terhadap 18.431 komoditi belum berhasil meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, mungkin karena komoditi-komoditi tersebut bukan komoditi utama. Perdagangan ASEAN dengan 10 negara MEE mencapai 50% dari total perdagangan ASEAN.<sup>9</sup>

Oleh karena itu dalam pertemuan di atas telah dibicarakan usaha-usaha untuk mendorong kelancaran arus perdagangan intra-ASEAN, antara lain perbaikan sistem preferensi dagang, pelonggaran bea masuk, harmonisasi peraturan, proyek industri patungan, dan investasi intra-ASEAN lewat sistem preferensi. Kerjasama Investasi hanya mencapai kemajuan kecil, dan tidak berjalan lancar karena masing-masing anggota berebut lokasi. Dari lima proyek AIP (*ASEAN Industrial Project*), baru dua proyek yang dilaksanakan, yaitu proyek pupuk di Indonesia dan Malaysia.

Selain itu dibicarakan usaha-usaha untuk menentukan strategi dan arah baru supaya kerjasama ekonomi ASEAN lebih efektif dan berarti, yaitu restrukturisasi komite-komite ekonomi yang ada dan penetapan komite-komite baru untuk menanggulangi tantangan-tantangan baru yang dihadapi karena adanya pengaruh ekonomi internasional yang lesu. Sampai sekarang ASEAN mempunyai lima komite, yaitu: (1) Keuangan dan Bank (COFAB) di Muangthai; (2) Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (COFAP) di Indonesia; (3) Industri, Mineral dan Energi (COIME) di Indonesia; (4) Transportasi dan Komunikasi (COTAC) di Malaysia; (5) Perdagangan dan Turisme (COTT) di Singapura.<sup>10</sup>

Dalam pertemuan di atas direncanakan dua komite baru, yaitu komite komoditi dan energi.<sup>11</sup> Pembentukan komite ini tampaknya ditujukan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul karena pengaruh situasi ekonomi internasional, seperti proteksionisme oleh negara-negara maju dan menurunkan harga minyak secara menyolok. Persetujuan Pengaturan Bersama Minyak Darurat (*ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme*) dan pengembangan sumber energi yang bervariasi di ASEAN yang dihasilkan dalam AMM ke-19 sebelumnya tampaknya merupakan akibat perkembangan di atas.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>*Business News*, 2 September 1986.

<sup>10</sup>*The Jakarta Post*, August 28, 1986.

Perkembangan kerjasama ekonomi di atas mendorong timbulnya gagasan Pasar Bersama ASEAN (*ASEAN Common Market*) yang diusulkan Filipina. Untuk ini akan diterapkan konsep perdagangan bebas (*zero tariff policy*) di antara negara-negara ASEAN yang pelaksanaannya akan diadakan secara bertahap sampai tahun 2000. Gagasan ini ditentang Indonesia. Karena industrinya belum kuat, Indonesia khawatir jika konsep perdagangan bebas dijalankan, ia akan kalah bersaing. Indonesia akan dibanjiri oleh produksi negara ASEAN lainnya, khususnya Singapura.

Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Impor Indonesia dari negara-negara ASEAN lainnya pada waktu ini hanya meliputi 14%. Impor Indonesia dari Singapura yang meliputi 50% adalah re-export (*indirect trade*) yang dalam Pasar Bersama ASEAN nanti dapat diatur tersendiri seperti juga ekspor dari negara-negara luar ASEAN. Negara-negara ASEAN tentu akan dapat melakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya pembanjiran yang dikhawatirkan itu. Bagi Indonesia adanya masa transisi 15 tahun akan memberi peluang untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut, antara lain dalam pembukaan pasaran masing-masing negara ASEAN. Negara yang maju membuka pasarnya terlebih dahulu dan negara yang kurang maju membuka pasarnya yang terakhir. Sebaliknya gagasan PBA ini akan mendorong Indonesia meningkatkan efisiensi dan daya saing, apalagi dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya, misalnya, upah buruh yang murah. Keinginan untuk berswasembada tanpa memperhitungkan efisiensi akan menghambat pembentukan pasaran bersama tersebut.<sup>13</sup>

Faktor-faktor itu diharapkan dapat dipertimbangkan lebih dalam manfaatnya oleh Indonesia, terutama untuk jangka panjang dalam usaha mencapai tujuan kerjasama ekonomi ASEAN yang ditetapkan bersama. Usaha-usaha atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh yang tidak bersifat menyeluruh dan regional selama ini ternyata tidak membawa kemajuan. Indonesia tentu tidak ingin ASEAN menjadi kerjasama regional yang tidak berfungsi karena kesempitan persepsi tentang kepentingan nasional.

Perlunya gagasan PBA ini untuk dikaji lebih jauh terlihat dari pernyataan Claude Cheysson (Ketua Komite MEE) dalam Pertemuan MEE-ASEAN akhir Oktober 1986 di Jakarta yang mengemukakan bahwa salah satu hambatan bagi peningkatan investasi MEE adalah belum terbentuknya PBA. Selain itu faktor-faktor geografi, peraturan yang sering berubah dan tidak jelas, kondisi yang tidak stabil di negara-negara ASEAN, telah menghambat kerjasama yang ada.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Lihat hasil wawancara Kompas dengan Dr. Djisman S. Simandjuntak, Prof. Dr. Ir. Mohamad Sadli, Sukamdani S. Gitosardjono, Dr. T.A.M. Simatupang; *Kompas*, 15 September 1986.

Di samping masalah politik dan ekonomi di atas tampak perkembangan menarik yang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN di luar kerangka ASEAN. Pada bulan Juni 1986 Indonesia mengikuti jejak kedua rekannya, Muangthai dan Singapura, memesan pesawat F-16 A sebanyak 8 (diperkirakan akan menyusul 4 lagi). Muangthai membeli 12 pesawat tersebut pada bulan September 1985, sedangkan Singapura 8 pesawat dalam tahun yang sama.<sup>15</sup> Pembelian tipe pesawat yang sama ini di antara negara-negara ASEAN akan dapat memperlancar dan meningkatkan kerjasama keamanan bilateral mereka, misalnya pemeliharaan dan latihan bersama.

### MASALAH KAMBOJA

Sampai saat ini usaha penyelesaian masalah Kamboja masih belum berhasil kecuali memperkuat persatuan ASEAN dengan ditunjukkannya kesatuan sikap mengenai masalah itu. Paling tidak kesan ini yang terlihat dari luar. ASEAN juga berhasil mempertahankan masalah Kamboja sebagai isu internasional dan kursi PKDK (Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja) di PBB.

Dalam AMM ke-19 di atas, masalah Kamboja tetap menjadi topik pembicaraan utama. Hal ini terlihat dari dihasilkannya 25 dari 89 pasal Pernyataan Bersama ASEAN yang menyangkut masalah Kamboja. Pernyataan ini hanya menyangkut prinsip-prinsip umum yang dianut ASEAN selama ini seperti penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, penentuan nasib sendiri rakyat Kamboja dan diadakannya Pemilu. ASEAN juga menegaskan kembali keabsahan dari "Himbauan ASEAN" (September 1983) dan "Pembicaraan Berperantara antara PKDK dan Vietnam" (gagasan Muangthai) Hal yang baru ialah mengenai dukungannya terhadap delapan usul PKDK. Tetapi ASEAN sendiri tidak menjanjikan usul baru.

Sikap ini mungkin erat kaitannya dengan perkembangan yang terjadi di Vietnam. Tampaknya meninggalnya Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) Le Duan dan diadakannya Kongres Partai PKV VI dalam bulan Desember 1986 tidak dilihat akan menghasilkan perubahan sikap mengenai Kamboja dalam waktu dekat.

Bagi Vietnam, situasi Kamboja tampaknya tidak dapat berubah lagi. Kemenangan militer Vietnam yang menguasai markas-markas utama PKDK: Phnom Malai, Tatum, Ampil pada awal tahun 1985 telah memperkuat posisi Vietnam yang tercermin dalam pengajuan usul-usulnya. Dalam Komurike Bersama Konferensi Menteri Luar Negeri Indocina X tanggal 17-18 Januari

1985, Vietnam mulai mengajukan usul penyingkiran Pol Pot dan kliknya. Bahkan dalam Komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina XI tanggal 15-16 Agustus 1985, Vietnam menyebutkan tahun 1990 sebagai waktu penarikan mundur pasukannya jika penyelesaian politik Kamboja yang dicapai menyepakati Pol Pot dan kliknya.

Demikian pula dalam Komunike Bersama Menteri Luar Negeri Indocina XII tanggal 23-24 Januari 1986 dikemukakan lagi usul-usul tersebut, yaitu: Kamboja tetap mengatakan kesediaannya untuk berunding dengan pihak oposisi Khmer baik sebagai kelompok maupun perseorangan untuk mencapai rekonsiliasi nasional, namun persyaratannya adalah penyingkiran Pol Pot dan penyelenggaraan Pemilu diadakan setelah pasukan Vietnam ditarik mundur seluruhnya; Kamboja menyambut baik semua upaya yang bertujuan mewujudkan perundingan; persetujuan penarikan mundur pasukan Vietnam bersamaan dengan penghentian bantuan militer dan material terhadap Pol Pot dan kliknya; campur-tangan luar terhadap masalah dalam negeri Kamboja, dan tindakan militer bermusuhan negara asing terhadap Kamboja; penyelesaian masalah Kamboja serta stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara harus dijamin dengan persetujuan koeksistensi damai antara semua negara di kawasan itu dengan berdasarkan prinsip-prinsip Dasasila Bandung 1955, Deklarasi Kuala Lumpur 1971, Deklarasi KTT ASEAN di Bali 1976 serta Pernyataan Tiga Negara Indocina di PBB tahun 1981.

Sebelum tahun 1985 usul-usul yang diajukan Vietnam bersifat lebih luas dan meliputi pembicaraan masalah perbatasan Muangthai dan Kamboja yang bertujuan untuk menyapu bersih sisa-sisa perlawanan kelompok anti-Vietnam di perbatasan ini. Usul-usul Konperensi Regional dan Internasional yang diajukannya hanya bermaksud membahas keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara. Tidak tercantum usul yang berkaitan langsung dengan masalah Kamboja. Baru pada tahun 1983, Vietnam menyatakan akan menarik mundur pasukannya setelah "ancaman Cina" lenyap. Dalam usul tahun 1983 ini tidak jelas disebutkan Pol Pot dan kliknya.

Dari perubahan usul-usul yang dikemukakan di atas yang tampaknya berkaitan dengan perkembangan situasi medan laga, agaknya Vietnam ingin mengingatkan bahwa dalam *real politik* yang unggul di medan lagalah yang akhirnya menetapkan syarat-syarat penyelesaian diplomatik.<sup>16</sup> Selain itu dengan penguasaannya terhadap markas-markas utama PKDK, Vietnam ingin menunjukkan ketidakmampuan kelompok-kelompok itu mempertahankan markas-markas mereka, apalagi menguasai atau merebut kembali wilayah Kamboja.

Sebenarnya ketidakmampuan kelompok-kelompok perlawanan itu bukan semata-mata karena kekurangan persenjataan, tetapi juga karena tidak adanya saling percaya dan persatuan di antara mereka. Sihanouk telah menuduh Khmer Merah membunuh beberapa orang pasukannya. Kemudian dalam KPNLF sejak pertengahan bulan Desember 1985 terjadi perebutan pimpinan karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Son Sann dan mereka ini membentuk kelompok sendiri. Jenderal Sak Sutsakhan dan Abdul Gafar Peangmeth membentuk Komite Sentral Sementara untuk Penyelamatan KPNLF (PCCS). Komite ini menyatakan Son Sann gagal memimpin KPNLF sehingga kubu mereka disapu bersih oleh Vietnam. Selain itu Son Sann dituduh juga tidak bersedia mengadakan kerjasama dengan kelompok Sihanoukist (ANS).<sup>17</sup>

Tampaknya perkembangan di atas menjadi latar belakang kunjungan ketiga pimpinan PKDK ke Beijing pada awal Maret 1986, setelah pertentangan di antara mereka dapat diatasi. Dalam pertemuan ini lahir delapan usul PKDK yang dikemukakan kepada Vietnam, yaitu: (1) perundingan dengan Hanoi dan mungkin negara-negara lain tentang penarikan sekitar 160.000 pasukan Vietnam dari Kamboja; (2) gencatan senjata untuk memberi kesempatan kepada Vietnam menarik pasukannya dalam dua tahap; (3) pengawasan PBB atas penarikan pasukan dan gencatan senjata; (4) perundingan dengan rezim Heng Samrin untuk membentuk "pemerintah empat partai Kamboja" dengan Sihanouk sebagai Presiden dan Son Sann sebagai Perdana Menteri; (5) pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan kelompok pengamat PBB; (6) restorasi suatu Kamboja yang non-blok, netral dan merdeka, dengan sistem demokrasi liberal serta tanpa adanya pasukan asing di wilayah ini. Pemerintahan netral yang baru dijamin oleh kelompok pengawas PBB yang akan berada di Kamboja untuk dua atau tiga tahun; (7) bantuan asing untuk membangun negeri; (8) suatu perjanjian non-agresi dan hidup berdampingan secara damai dengan Vietnam.<sup>18</sup>

Kedelapan usul ini pertama kali diajukan PKDK. Sebelumnya Sihanouk telah beberapa kali mengajukan usul, seperti pemerintahan Rekonsiliasi Nasional dan pertemuan tidak resmi antara PKDK dan rezim Heng Samrin, termasuk Uni Soviet, Cina, ASEAN dan Vietnam. Tetapi baru sekali ini usul pembentukan pemerintahan koalisi baru Kamboja yang menyertakan ketiga kelompok PKDK dan rezim Heng Samrin didukung dan disepakati oleh kedua kelompok lainnya.

<sup>17</sup>Nayan Chanda, "The Prince in a Bind," *Far Eastern Economic Review (FEER)* (6 November 1986): hal. 42.

Tampaknya kesadaran dan ketidakmampuan pasukan mereka untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Vietnam mendorong timbulnya kesatuan sikap terhadap kedelapan usul tersebut sebagai suatu cara untuk memenangkan perjuangan mereka secara politis. Dari usul-usul tersebut jelas terlihat tujuan yang ingin dicapai.

Penarikan pasukan Vietnam akan memberi peluang bagi Khmer Merah untuk memasuki dan menguasai kembali Kamboja. Kelompok ini, khususnya Pol Pot dan kliknya, telah ditolak Vietnam. Sebaliknya Sihanouk dan Son Sann akan diterima Vietnam bergabung dengan Heng Samrin asal mereka melepaskan diri dari kelompok Khmer Merah. Usul penunjukan Sihanouk sebagai Presiden dan Son Sann sebagai Perdana Menteri akan menggeser Heng Samrin. Demikian pula dengan usul restorasi Kamboja yang non-blok, netral dan merdeka dengan sistem demokrasi liberal serta tanpa adanya pasukan asing di wilayah ini, tidak saja menyingkirkan Vietnam secara fisik, tetapi juga hegemoninya.

Dengan usul itu Khmer Merah ingin menunjukkan bahwa kelompok ini bersedia mengorbankan sistem pemerintah komunis yang ingin dianutnya dengan harapan Vietnam juga bersedia melepaskan keinginannya akan Kamboja dengan sistem pemerintahan komunis. Yang penting bagi Khmer Merah dapat ikut-serta berkuasa di Kamboja, walaupun yang menjadi pemimpin bukan dari kelompoknya dan berada di bawah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Tetapi adalah kenyataan sejarah bahwa pada tahun 1976 Khmer Merah merebut kekuasaan Sihanouk setelah Pangeran ini dinobatkan setahun sesudahnya. Dan apabila ini terjadi adanya suatu pemerintahan demokrasi liberal diragukan.

Sebaliknya bagi Vietnam, Kamboja yang dapat menjamin kepentingan keamanannya adalah Kamboja yang komunis dan berada di bawah pengaruhnya. Jika Kamboja yang demikian ini sudah dapat menjamin keamanannya, Vietnam akan bersedia menarik mundur pasukannya. Tetapi selama ini belum tercapai dan Kamboja tidak dapat menjamin keamanannya, Vietnam akan tetap mempertahankan pasukannya di wilayah ini. Hal ini tampaknya tidak dapat diganggu-gugat lagi.

Usul-usul seperti gencatan senjata dan Pemilu di bawah pengawasan PBB hanya memperlemah posisi Vietnam. Vietnam bersedia melakukan gencatan senjata jika keamanannya terjamin dan akan menerima pengawasan PBB jika lembaga ini melepaskan pengakuannya terhadap Pol Pot. Usul perjanjian non-agresi dan hidup berdampingan secara damai tampaknya tidak ditentang Vietnam sejauh penyelesaian politik Kamboja yang dicapai telah menjamin keamanannya. Hal bantuan asing jelas tidak dapat ditentukan oleh Vietnam

Dengan demikian tidak mengherankan Vietnam dan Phnom Penh menolok kedelapan usul tersebut. Sebaliknya negara-negara ASEAN menyatakan dukungannya terhadap kedelapan usul itu yang dikemukakan dalam Pernyataan Bersama tanggal 29 April 1986 di Bali.

Sebenarnya adalah terlalu naif baik bagi PKDK maupun ASEAN untuk tidak mengetahui sebelumnya bahwa usul-usul yang tidak menampung kepentingan Vietnam tersebut akan ditolak Vietnam. Dari usul-usul ASEAN yang ditolak Vietnam sebelumnya jelas sikap dan posisi negara ini. Vietnam tidak akan melepaskan begitu saja apa yang telah diperolehnya dengan susah payah demi keamanannya tanpa *quid pro quo*, apalagi melihat realitas politik yang ada pada saat ini. Heng Samrin dengan dukungan Vietnam telah menguasai hampir seluruh wilayah Kamboja.

Inisiatif PKDK mengajukan usul-usul yang jelas akan ditolak Vietnam hanya akan menempatkan negara ini dalam pandangan internasional sebagai pihak yang tidak menginginkan perdamaian. Adanya dukungan ASEAN terhadap gagasan itu akan dapat memperkokoh kedudukan internasional PKDK, sebaliknya memojokkan posisi Vietnam secara diplomatis.

Tetapi di lain pihak posisi Vietnam makin kuat. Dalam Komunike Bersama Konferensi Menteri Luar Negeri Indocina XIII tanggal 17-18 Agustus 1986, usul penyingkiran Pol Pot yang dikaitkan dengan penarikan mundur pasukan-pasukan Vietnam masih tetap menjadi faktor utama. Lebih jauh komunike ini bahkan mengungkapkan bahwa kalau semua pihak menyetujui usul-usul ini, rencana implementasinya dapat dibicarakan dari sekarang sehubungan dengan penyelesaian politik masalah Kamboja dan perdamaian serta stabilitas di Asia Tenggara. Ketiga negara Indocina telah siap berdiskusi dengan seluruh pihak untuk mencapai awal dari penyelesaian tersebut.

Selain itu, dalam komunike tersebut dinyatakan kesediaan Vietnam untuk berunding baik dengan Muangthai maupun Cina. Usul dialog antara Muangthai dan Vietnam telah diusulkan Indonesia sebelumnya dan telah dilaksanakan pada bulan April 1986, tetapi belum mencapai hasil. Dengan kesediaan ini dialog antara dua negara dapat dilanjutkan sebagai bagian dari usaha mencari penyelesaian politik masalah Kamboja. Kesediaan Vietnam untuk berunding dengan Cina belum mendapat tanggapan positif.

Sihanouk menyadari peranan Cina tersebut dan meminta Indonesia menemui pemimpin Cina untuk membicarakan masalah Kamboja. Dalam pertemuannya dengan Menlu Mochtar Kusumaatmadja di New York, Menlu Cina Wu Xueqian mengemukakan bahwa Cina tidak bermaksud mengembalikan kelompok Khmer Merah berkuasa di Kamboja.<sup>19</sup>

Pernyataan ini dibantah dan dianggap tidak benar oleh Sihanouk. Menurut Sihanouk hal itu bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh utama Cina, Deng Xiaoping, kepada kelompok-kelompok PKDK yang mendesak supaya ketiga unsur itu tetap bersatu.<sup>20</sup> Oleh karena itu tampaknya Sihanouk beranggapan bahwa Cina tetap mendukung Khmer Merah dan tidak menginginkan pemerintahan yang benar-benar demokratis di Kamboja. Hal ini berarti Vietnam tidak mungkin meninggalkan Kamboja.

Dari usul-usul dan pernyataan di atas baik dari Vietnam maupun dari Cina, sebenarnya dapat diperoleh gambaran dan penilaian mengenai sikap dan posisi masing-masing pihak yang terlibat. Tetapi selama ini usul-usul dan gagasan-gagasan yang diajukan ASEAN tidak bersifat substantif, melainkan sekedar menyangkut mekanisme atau wahana. ASEAN memang tampak aktif berinisiatif dengan usul dan gagasan tersebut, tetapi selama masalah hakiki tidak menjadi perhatian ASEAN, penyelesaian politik masalah Kamboja sulit dicapai. Bahkan walaupun pimpinan PKV setelah Kongres VI bulan Desember 1986 bersikap lebih lunak, sulit diharapkan Vietnam akan bergeser dari prinsip utamanya, yaitu penyingkiran Pol Pot dan kliknya, yang dilihatnya sebagai moncong, dan dengan demikian ancaman Cina.

Sebaliknya Vietnam dapat menyadari bahwa adalah sulit untuk mencapai penyelesaian politik Kamboja menurutkan usul-usul Vietnam semata-mata. Paling tidak Vietnam dapat melunakkan sikapnya mengenai kelompok Khmer Merah tanpa mengabaikan prinsip utama yaitu penyingkiran Pol Pot. Kemungkinan ini akan diperkuat jika terjadi peredaan ketegangan antara Vietnam dan Cina.

Penyelesaian politik masalah Kamboja akan mendukung pembaharuan ekonomi Vietnam, karena ditariknya sanksi-sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat, terutama Jepang dan Amerika Serikat. Walaupun demikian saat ini tampaknya negara ini mungkin lebih tertarik oleh janji Soviet untuk meningkatkan bantuan ekonomi kepadanya, yang dikemukakan Ligachev pada Kongres VI PKV bulan Desember 1986.<sup>21</sup>

## PEMBAHARUAN EKONOMI

Di sub kawasan Indocina terjadi perkembangan penting dalam negara-negara Vietnam dan Laos yang berhubungan dengan masalah pembaharuan ekonomi dan pergantian pimpinan. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi dan menentukan perkembangan tidak saja dalam negeri masing-masing

negara, tetapi juga kawasan Asia Tenggara. Persoalan-persoalan yang dihadapi Vietnam pada masa ini tidak saja menyangkut kesulitan ekonomi yang menyebabkan diadakannya perombakan Kabinet Vietnam, tetapi juga pergantian pimpinan Partai Komunis Vietnam (PKV) karena meninggalnya Sekjen PKV, Le Duan, pada tanggal 10 Juli 1986.

Krisis ekonomi yang dihadapi Vietnam saat ini merupakan akibat lanjut dari kebijaksanaan pemerintah mengenai pembaharuan mata uang yang menggantikan Dong lama dengan Dong baru dengan nilai 1 berbanding 10 pada bulan September 1985 yang lalu. Timbul kenaikan harga, kekacauan dalam struktur harga dan upah yang memacetkan industri, dan makin langkanya barang-barang yang terus berlangsung telah menghancurkan perekonomian Vietnam. Keadaan ini ditambah lagi dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan pengangguran serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah yang mengatur redistribusi penduduk telah gagal karena pelaksanaan yang kurang siap, terutama oleh penguasa lokal.

Situasi inilah yang tampaknya menjadi latar-belakang keluarnya keputusan perombakan Kabinet oleh Dewan Negara Vietnam yang diumumkan dalam Komunike tanggal 21 Juni 1986, yaitu setelah Sidang Pleno ke-6 Komite Sentral PKV tanggal 19 Mei-6 Juni 1986. Delapan Menteri, termasuk Wakil PM To Huu, yang telah diganti menangani bidang-bidang: komunikasi dan transpor, keuangan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, bank negara, pertambangan dan batubara, dan kebudayaan. Penggantian ini mencerminkan kegagalan menteri-menteri terdahulu dalam usaha pembangunan perekonomian Vietnam yang menekankan perlunya badan-badan usaha negara dan mengecam usaha-usaha swasta. Sebagian besar pengganti-pengganti tersebut adalah pejabat-pejabat yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi dan menjadi barisan depan pembaharuan di beberapa propinsi.

Selain itu Sidang Komite Sentral PVK menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, yaitu: desentralisasi yang lebih besar, khususnya di bidang perencanaan, pembubaran badan-badan milik negara yang jelas tidak mampu lagi memenuhi standar umum dalam berproduksi, pemberian kebebasan kepada para manajer yang dinilai berhasil untuk memecat atau mengangkat tenaga kerja, dan pemberian otonomi kepada pimpinan bidang-bidang usaha untuk memperoleh pinjaman bagi pengembangan usahanya.<sup>22</sup> Dari kebijakan-kebijakan ini tampak akan ada serangkaian perubahan mendasar yang akan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh pembaharu dalam Kabinet.

Perombakan Kabinet dengan tokoh-tokoh pembaharu dan dihasilkannya kebijakan-kebijakan baru tampaknya mempengaruhi pergantian pimpinan PKV karena meninggalnya Sekjen PKV, Le Duan. Diberitakan adanya dua kelompok dalam Politbiro PKV, yaitu kelompok pertama yang menghendaki peranan negara dan partai dalam menangani perekonomian Vietnam, dan kelompok kedua yang menghendaki desentralisasi ekonomi yang lebih besar. Kelompok terakhir ini dikenal juga sebagai kelompok reformis.<sup>23</sup>

Dalam tradisi Vietnam, pergantian personal dilakukan secara berhati-hati agar tidak memberikan kesan ketidak-satuan atau secara terbuka mendiskreditkan kepemimpinan yang sedang berlangsung. Hal inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pembaharu yang mengkonsolidasi posisi secara hati-hati dengan alasan kesatuan partai, keseimbangan regional, dan memperoleh konsensus yang lebih luas. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Nguyen Van Linh, Vo Chi Cong, dan Von Van Kiet secara pelan-pelan mendapatkan posisi yang penting.<sup>24</sup>

Kongres VI PKV dalam bulan Desember 1986 telah melahirkan pergantian kepemimpinan di negara ini. Kedudukan Sekjen PKV berpindah tangan dari Truong Chinh kepada Nguyen Van Linh. PM Pham Van Dong digantikan oleh Vo Chi Cong. Nguyen Van Linh dan Vo Chi Cong merupakan tokoh-tokoh pembaharu yang telah berhasil mengadakan pembangunan ekonomi di berbagai propinsi. Dengan terpilihnya mereka ini diharapkan pimpinan baru akan berhasil pula dalam melaksanakan pembaharuan ekonomi nasional.

Demikianlah perubahan yang terjadi di Vietnam yang mungkin akan mempengaruhi sikap dan pandangan Vietnam dalam hubungannya dengan dunia internasional umumnya, dan di kawasan Asia Tenggara khususnya. Bagaimanapun pembaharuan ekonomi akan membutuhkan hubungan yang lebih luas, terutama bantuan dan kerjasama ekonomi negara-negara luar. Selama ini masalah Kamboja telah menjadi perintang bagi ditingkatkannya hubungan dan kerjasama demikian, terutama bantuan ekonomi negara Barat, Jepang, dan AS. Sehubungan dengan inilah Vietnam diharapkan lebih lunak dalam mencapai penyelesaian politik Kamboja.

Seiring dengan perkembangan di atas, di Laos terjadi pengunduran diri Souphanouvong sebagai Presiden dan digantikan oleh Deputi PM Phoumi Vongvichit pada bulan Oktober 1986, sebulan sebelum Kongres Partai Pathet Lao diadakan. Pergantian ini tampaknya berkaitan erat dengan kemungkinan bicarakaninya pembaharuan ekonomi dalam kongres yang direncanakan.

<sup>23</sup>Laurent Maillard, "Who'll Succeed Hanoi's Old Guard?" *The Jakarta Post*, 15 Mei 1986.

Kemungkinan ini diperkirakan karena terlihat pejabat-pejabat Pemerintah Laos yang secara tiba-tiba mulai menerima pihak asing yang selama ini dihindarkan. Pada bulan Oktober 1986, Claude Cheysson dari MEE telah berkunjung ke Laos. Setelah kunjungannya ini, Cheysson mengemukakan bahwa bantuan ekonomi MEE kepada Laos akan ditingkatkan.<sup>25</sup>

Perkembangan ini diawali oleh inisiatif Laos untuk menawarkan perundingan dengan Muangthai mengenai masalah-masalah bilateral di antara kedua negara. Masalah sengketa tiga desa di daerah perbatasan, meningkatnya perdagangan gelap, dan masalah pengungsi akan menjadi bahan pembicaraan di antara kedua negara. Muangthai telah menanggapi inisiatif ini dengan mengiriskan delegasi yang diketuai PM Arun Panupong pada tanggal 27 November 1986.<sup>26</sup>

Perkembangan di atas menunjukkan kesediaan Laos untuk mulai bersikap lebih terbuka terhadap negara-negara non-komunis yang mungkin juga dapat dilihat sebagai langkah awal untuk melaksanakan pembaharuan ekonomi yang akan direncanakan. Selain itu perkembangan tersebut lebih didorong oleh Uni Soviet yang menganjurkan peningkatan hubungan-hubungan di Asia dalam pidato Gorbachev tanggal 28 Juli 1986 di Vladivostok. Inisiatif ini juga merupakan isyarat bagi Vietnam untuk mengambil inisiatif meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonominya di kawasan ini.<sup>27</sup>

Dengan demikian terjadinya berbagai perkembangan di negara-negara Indocina tampaknya tidak dapat dilepaskan dari move Soviet terhadap sub-kawasan ini yang pada gilirannya akan membawa pengaruh kepada kawasan Asia Tenggara. Terjadinya persaingan atau pendekatan Sino-Soviet juga akan sangat mempengaruhi perkembangan negara-negara di sub-kawasan ini. Meningkatnya persaingan antara Cina dan Uni Soviet akan memperkuat pertentangan Cina dan Vietnam, karena Cina memandang kehadiran Soviet di Vietnam sebagai pengepungan terhadapnya. Sebaliknya terjadinya pendekatan di antara Cina dan Uni Soviet akan dapat meredakan kekhawatiran Cina terhadap Uni Soviet dan mengurangi ketegangan hubungannya dengan Vietnam.

## STABILITAS POLITIK

Di beberapa negara ASEAN terjadi perkembangan-perkembangan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik masing-masing negara yang mungkin

<sup>25</sup>*The Jakarta Post*, 1 November 1986; Rodney Tasker, "The 'Red Prince' Bows Out," *FEER* (13 November 1986): hal. 60.

<sup>26</sup>*Ibid.*; Paisal Sricharatchanya, "Barter on the Border," *FEER* (16 Oktober 1986): hal. 14.

membawa perubahan-perubahan tertentu seandainya krisis politik yang timbul tidak teratasi. Timbulnya krisis-krisis politik telah menyebabkan dipercepatnya Pemilu masing-masing negara daripada yang direncanakan sebelumnya. Perkembangan ini terlihat di negara-negara: Muangthai, Malaysia, dan Filipina.

Krisis politik di Muangthai diawali dengan dibubarkannya Parlemen pada awal Mei 1986 setelah koalisi empat partai PM Prem Tinsulanonda kalah dalam pemungutan suara mengenai kebijaksanaan ekonomi, Rancangan Undang-undang Registrasi Diesel, dan munculnya mosi tidak percaya. Kekalahan ini disebabkan oleh pembangkangan beberapa anggota SAP (Partai Aksi Sosial) yang mendukung pihak oposisi. Rancangan ini dikalahkan dengan perbandingan suara 147 dan 145. Hal ini menyebabkan diadakannya Pemilu tanggal 27 Juli 1986, dipercepat daripada rencana sebelumnya.<sup>28</sup>

Beberapa minggu setelah pembubaran Parlemen, PM Prem mengambil keputusan yang mengejutkan, yaitu pemecatan Jenderal Arthit Kamlangek dari jabatan Panglima Angkatan Darat, tetapi tetap menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata yang bersifat simbolis. Jenderal Arthit dianggap terlalu turut campur dalam dunia politik dan telah mendalangi pembangkangan beberapa anggota Parlemen di atas.

Pemecatan ini merupakan klimaks dari pertentangan yang terjadi di antara PM Prem dan Jenderal Arthit sejak tahun 1982. Sebelumnya mereka mempunyai kerjasama yang kuat, bahkan Jenderal Arthit telah menggagalkan terjadinya kudeta pada tahun 1981. Tetapi usaha-usaha Jenderal Arthit yang dipandang PM Prem tidak saja membahayakan kedudukannya, tetapi juga ingin memperkuat posisi militer dalam pemerintahan Muangthai telah menyebabkan timbulnya persaingan politik di antara mereka.

Pada tahun 1982 Jenderal Arthit menuntut supaya wewenang senat yang dikuasai oleh tokoh-tokoh militer disamakan dengan Parlemen yang anggotanya ditentukan oleh Pemilu. Kemudian tahun 1984 Jenderal Arthit mengancam keputusan PM Prem untuk mendevaluasi mata uang Baht dengan 14,5% dan menuntut penggantian beberapa menteri. Semua ini dapat diatasi karena dukungan terhadap PM Prem masih kuat. Bahkan pada bulan Maret 1986 PM Prem tidak bersedia memperpanjang masa jabatan Jenderal Arthit dan kemudian disusul dengan pemecatan di atas.<sup>29</sup>

Posisi PM Prem yang kuat ini kemudian teruji lagi dalam Pemilu tanggal 27 Juli 1986. PM Prem tidak mengajukan atau mencalonkan dirinya dalam

<sup>28</sup>Antara, 2 Mei 1986.

Pemilu ini. Tetapi karena tidak adanya partai yang mendapatkan suara mayoritas mutlak yang berhak menunjuk Perdana Menteri dari partai pemenang, maka PM Prem merupakan kompromi yang diterima koalisi untuk menjadi PM kembali walaupun dia tidak mencalonkan diri sebelumnya. Para tokoh partai terutama dari DAP (*Democrat Action Party*) yang sebelumnya dengan lantang menyatakan bahwa orang yang berhak jadi PM adalah orang yang menang dalam Pemilu dan pemimpin partai politik tidak akan memberi kesempatan kepada tokoh yang tidak menang dalam Pemilu menjadi PM akhirnya menerima kompromi tersebut.

Semua perkembangan ini menunjukkan posisi PM Prem yang kuat bukan saja karena dukungan raja dan sebagian besar kelompok militer, tetapi juga keberhasilannya mengatasi persoalan-persoalan yang timbul baik dalam mengatasi percobaan kudeta maupun tantangan-tantangan terhadap kebijaksanaannya selama periode pemerintahannya. Selain itu tindakannya terhadap Jenderal Arthit merupakan keberhasilannya untuk mengurangi dominasi dan partisipasi yang besar dari militer yang selama setengah abad ini demikian dominan. Ia berhasil memperlihatkan bahwa politik tidak harus tunduk kepada kelompok di luarnya, yaitu militer.

Semuanya ini telah menunjang kestabilan politik Muangthai yang selama ini selalu diwarnai kudeta satu ke kudeta lainnya. Masalah pokok yang dihadapi selanjutnya oleh PM Prem ialah bagaimana memantapkan sistem politik yang efektif yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai dan tetap memperoleh dukungan militer bagi pemerintahannya.

Di Malaysia pun terjadi berbagai perkembangan yang menimbulkan krisis politik dalam pemerintahan PM Mahathir. Di negara bagian Sabah terjadi pertentangan antara Datuk Pairin Kitingan dari Partai Bersatu Sabah (PBS) dan Tun Mustapha Harun dari USNO (*United Sabah National Organization*) yang bergabung dengan Partai Berjaya mengenai siapa yang berhak menjadi Menteri Besar Sabah.<sup>30</sup> Persengketaan ini telah dieksploitasi menjadi masalah ras dan agama yang rawan bagi Malaysia yang pluralistis. Tetapi akhirnya masalah ini dapat diatasi dengan turut campurnya pemerintahan pusat dan Datuk Pairin Kitingan memenangkan kembali Pemilu yang diadakan untuk kedua kalinya.

Krisis Sabah berhasil diatasi karena pemerintah pusat telah bertindak hati-hati menangani masalah negara bagiannya yang telah dieksploitasi menjadi masalah ras dan agama untuk bersikap tidak memihak, karena bagaimanapun Partai Berjaya yang terlibat adalah anggota Barisan Nasional yang mayoritas anggotanya adalah Melayu. Sabah tetap menjadi bagian dari Federasi

Malaysia, mungkin karena negara bagian ini menilai keikutsertaannya dalam federasi akan dapat terus mendorong kemajuan wilayahnya.

Di samping itu timbul berbagai persoalan yang dapat mengancam kesatuan Barisan Nasional umumnya, dan Partai UMNO (*United Malaysian National Organization*) khususnya. Perebutan kepemimpinan dalam Partai MCA (*Malaysia Chinese Association*) dan kemudian dibayangi oleh masalah penahanan Presiden MCA, Tan Koon Swan, oleh Pemerintah Singapura berkaitan dengan bangkrutnya perusahaan Pan-Electric, akan dapat mempengaruhi kelancaran kerja pemerintah karena sebagian dari menteri-menterinya berasal dari partai ini.<sup>31</sup>

Kemudian persoalan permintaan pengunduran diri Deputy PM Datuk Musa Hitam baik dari jabatannya dalam pemerintah maupun dari kepemimpinan Partai UMNO akan dapat mengancam persatuan UMNO karena terpecahnya dukungan terhadap Mahathir dan Musa Hitam yang semula dikenal sebagai pasangan yang paling serasi dalam mengendalikan pemerintahan. Turut campurnya kaum tua dalam UMNO untuk mengakurkan mereka berdua hanya berhasil membuat Datuk Musa Hitam tidak menurutkan niatnya melepaskan jabatannya dalam partai. Jabatannya dalam pemerintahan tetap dilepaskan karena Datuk Musa Hitam merasa tidak sanggup lagi bekerjasama dengan PM Mahathir. Ia juga merasa bahwa hanya dengan keputusannya itu tuduhan terhadap dirinya ingin merebut kedudukan PM tertangkis. Pengunduran diri Datuk Musa Hitam ini dari pemerintahan menyebabkan PM Mahathir membubarkan kabinet dan sebagai penggantinya telah ditunjuk Ghafar Baba sebagai Deputy PM.

Persoalan politik lainnya yang dihadapi Malaysia adalah makin meningkatnya oposisi dari Partai Islam se-Malaysia (PAS), terutama di negara-negara bagian Semenanjung Malaya bagian Utara (Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Perlis). Meningkatnya dukungan terhadap PAS di wilayah-wilayah ini akan memberi pukulan kepada PM Mahathir karena daerah ini adalah basis politiknya.<sup>32</sup>

Berbagai persoalan di atas dan kekhawatiran timbulnya isu-isu baru yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan PM Mahathir telah mendorongnya untuk membubarkan Parlemen Nasional dan 11 dari 13 parlemen negara bagian. Tindakan ini disusul dengan diumumkannya Pemilu pada bulan Agustus 1986 yang dipercepat 11 bulan daripada rencana semula. Dengan tindakannya ini tampaknya PM Mahathir ingin menguji popularitas kepemimpinannya setelah timbulnya berbagai krisis politik di atas, dan sekali-

<sup>31</sup>A.R. Sutono, "Krisis Politik Malaysia," *Media Karya* (11 April 1986), hal. 55.

gus mencari mandat baru untuk mengurus masalah ekonomi dan politik dalam negerinya.

Ternyata kepemimpinan PM Mahathir masih kuat dengan dimenangkan-nya Pemilu oleh Barisan Nasional yang meraih 148 dari 177 kursi Parlemen. Persoalan lebih lanjut bagi PM Mahathir adalah bagaimana mempertahankan persatuan tidak saja dalam UMNO sendiri, tetapi juga koalisi Barisan Nasional di satu pihak. Di lain pihak masalah penting lainnya adalah bagaimana mempertahankan integrasi nasional dari masyarakat Malaysia yang pluralis-tis, terutama kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Di Filipina, Pemilu yang dipercepat oleh Presiden Marcos ternyata telah membawa kejatuhannya dan dipilihnya Corazon Aquino sebagai Presiden setelah melalui masa Pemilu yang kontroversial. Kemenangan Presiden Corry Aquino tidak saja karena dukungan kekuatan rakyat dan gereja, tetapi juga kelompok militer, terutama Jenderal Fidel Ramos dan Menhan Juan Ponce Enrile yang membelot dari Marcos.

Bekas Presiden Marcos telah mewarisi berbagai persoalan yang harus diselesaikan Corry baik bidang politik maupun ekonomi. Dalam bidang politik masalah-masalah yang dihadapi Corry antara lain, pemberontakan komunis CPP (Partai Komunis Filipina) dan sayap militernya NPA (Tentara Rakyat Baru); gerakan separatis muslim MNLF (Front Pembebasan Nasional Moro) di bagian Filipina Selatan; hubungan Filipina dan Amerika Serikat (AS); dan tantangan dari para pendukung Marcos yang merongrong pemerintahan Corry Aquino.

Dalam bidang ekonomi Corry mewarisi hutang luar negeri sebanyak US\$26 milyar dan anggaran belanja yang defisit US\$1,9 milyar.<sup>33</sup> Keadaan ini masih diperumit oleh larinya modal ke luar negeri, pinjaman luar negeri yang makin sulit diperoleh, dan meningkatnya pengangguran.

Sementara persoalan-persoalan di atas tidak dapat segera diatasi Corry Aquino telah melakukan usaha-usaha yang penting dalam membereskan pemerintahannya, yaitu: membebaskan tahanan politik, termasuk beberapa pemimpin komunis; menghapuskan Konstitusi 1973 dan menandatangani konstitusi sementara yang disebut sebagai "Konstitusi Kebebasan"; membubarkan Parlemen (*Batasang Pambansa*); membentuk Komisi Konstitusi yang terdiri dari berbagai golongan, kecuali komunis; dan menawarkan gencatan senjata kepada pemberontak komunis yang diwakili oleh NDF (Front Demokrasi Nasional).

Dalam bidang ekonomi Corry Aquino mulai merancang usaha-usaha untuk pemulihan ekonomi. Corry membentuk komisi untuk menyelidiki dan mendapatkan kembali kekayaan Marcos yang diperkirakan mencapai US\$10 milyar. Tetapi sejauh ini usaha itu belum mendatangkan hasil yang memuaskan. Dalam mencari bantuan ekonomi dan pinjaman luar negeri, Corry juga telah mengunjungi negara-negara AS dan Jepang dan telah mendapatkan tanggapan positif dari kedua negara ini.

Masalah ekonomi merupakan salah satu persoalan yang paling sulit yang harus dihadapi Corry di samping masalah pemberontakan komunis. Dan pada hakikatnya hal ini akan mempengaruhi usaha-usaha yang ditempuh Corry untuk mengadakan rekonsiliasi nasional yang direncanakannya, yaitu penyelesaian secara damai baik dengan pemberontak komunis maupun dengan gerakan separatis Moro. Corry percaya bahwa berkembangnya pemberontakan-pemberontakan mereka ini disebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Marcos, terutama dalam bidang ekonomi.

Tetapi ternyata pendekatan Corry secara damai terhadap pemberontak komunis tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari militer, terutama Menhan Juan Ponce Enrile. Enrile dengan terang-terangan telah mengecam kebijaksanaan Corry tersebut dan bahkan juga menggugat beberapa anggota Kabinet yang dipandang sebagai kelompok kiri. Hal ini makin meningkat setelah tidak terlihat kaum pemberontak komunis menunjukkan kesediaannya untuk menerima tawaran gencatan senjata yang diajukan Corry sejak bulan Mei 1986 sementara timbul bentrokan-bentrokan di antara militer dan komunis. Enrile menganggap pemberontakan komunis harus diatasi dengan kekuatan militer. Dalam pertentangan ini tampak Jenderal Fidel Ramos menunjukkan sikap tetap mendukung Corry.

Enrile juga mempersoalkan kedudukan Corry sebagai presiden. Menurut Enrile, Corry harus mengadakan Pemilu kembali untuk pemilihan presiden baru, segera setelah rancangan konstitusi baru diratifikasi. Pandangan ini didukung oleh Wakil Presiden Salvador Laurel.

Di lain pihak masalah pemberontakan MNLF tampaknya tidak terlalu sulit diatasi. Telah dicapai persetujuan gencatan senjata pada bulan September 1986 dengan Nur Misuari, ketua MNLF. Kelompok lainnya MILF (Front Pembebasan Islam Moro) yang lebih radikal di bawah pimpinan Selamat Hashim, walaupun dia tidak mengakui persetujuan di atas, telah bersedia mengadakan perundingan dengan Presiden Corry Aquino.

Persoalan-persoalan di atas mencapai klimaksnya ketika terjadi usaha

*Ng Bayan* (Partai Rakyat) dan Federasi Gerakan Buruh 1 Mei, pada pertengahan November 1986. Pembunuhan ini terjadi pada saat-saat perundingan gencatan senjata sedang diadakan antara Pemerintah Filipina dan NDF sebagai realisasi dari tawaran kelompok ini sejak awal November. Peristiwa itu telah menghentikan perundingan, karena pihak NDF menuntut supaya Menhan Enrile yang dituduh mendalangi pembunuhan tersebut dipecat oleh Corry Aquino sebelum perundingan dilanjutkan. Masalah ini kemudian disusul oleh pernyataan Jenderal Fidel Ramos yang mengusulkan supaya diadakan penggantian anggota kabinet yang tidak mampu.

Dihimpit oleh tuntutan dan usul tersebut akhirnya Presiden Corry mengambil keputusan memecat Enrile. Sementara itu ia mengancam kaum komunis untuk segera mencapai persetujuan gencatan senjata sampai batas waktu tanggal 1 Desember 1986 sebelum Corry mengubah kebijaksanaannya untuk menggunakan kekuatan senjata menghancurkan mereka. Kemudian diadakan perombakan kabinet untuk memenuhi usul Ramos.

Menjelang akhir tahun 1986 tampaknya Corry dapat bernafas lega karena telah dicapai persetujuan gencatan senjata dengan NDF. Sebelumnya pada bulan September telah dicapai persetujuan gencatan senjata dengan CPLA (Tentara Pembebasan Rakyat Cordillera) yang dipimpin bekas pastor Balweg. Perongrongan dari para pendukung Marcos dan kecaman dari Enrile telah diatasi, dan perombakan kabinet telah dilakukan serta Rancangan Konstitusi berhasil diselesaikan. Rancangan ini akan diajukan dalam plebisit nasional pada bulan Februari 1986 untuk mendapatkan dukungan rakyat. Demikian pula masalah pangkalan AS di Filipina dan kedudukan Corry sebagai Presiden sampai tahun 1992 telah ditentukan dalam rancangan tersebut.

Berhasilnya rancangan konstitusi diterima rakyat dalam plebisit nanti dan ditaatinya persetujuan gencatan senjata sampai batas waktu yang ditetapkan (Februari 1987) akan menjadi pelicin bagi Corry untuk meneruskan roda pemerintahannya yang didukung rakyat. Ketidakberhasilan untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas hanya akan membawa Filipina kepada gejolak-gejolak politik yang tak akan habis-habisnya yang pada gilirannya akan mengancam kestabilan dan perdamaian kawasan Asia Tenggara.